

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BALAI GAKKUM LHK
WILAYAH
KALIMANTAN**

Laporan ini diterbitkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Jalan P. Untung Suropati Kompleks BDLHK, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di tahun 2024.

Rencana Kerja 2024 ini memuat hasil diskusi dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

PERATURAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH
KALIMANTAN

NOMOR : P.1/BPPHLHK-IV/11/2023

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH
KALIMANTAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tercapainya rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, maka kepada masing-masing satuan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

//3.Undang-undang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

//17.Peraturan....

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

Pertama : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 10 November 2023



Kepala Balai,

David Muhammad, S.Sos, M.H

NIP. 19730707 200003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
Kondisi Umum Balai Gakkum Kalimantan	3
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	7
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Data Terpilah Sarana Prasarana	9
H. Pengarusutamaan Gender TA 2024	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 - 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	11
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2022 dan Prognosis Tahun 2023	11
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023	14
C. <i>Automatic Adjustment</i> (Pencadangan Anggaran)	16
BAB III. RENCANA KERJA 2024	17
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional	17
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan	18
C. Pendanaan Kegiatan Tahun 2024	20
BAB IV. PENUTUP	22

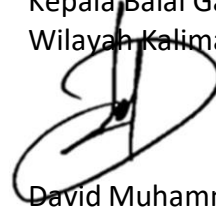
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan serta memantapkan pengelolaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkum LHK Kalimantan) dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat target capaian kegiatan yang dilakukan Balai Gakkum LHK Kalimantan secara sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman dan arahan umum dalam mengaktualisasi kerja-kerja penegakan hukum di Balai Gakkum LHK Kalimantan. Oleh sebab itu, perlu peran serta seluruh jajaran dan personil Balai Gakkum LHK Kalimantan untuk mengawal dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ini.

Harapan selanjutnya adalah dapat tercapainya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dan personil Balai Gakkum LHK Kalimantan dalam mencapai output kinerja setiap tahunnya.

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Kalimantan



David Muhammad, S.Sos, M.H

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan dokumen tahun kelima di dalam pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2020 - 2024. Dokumen Renja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan ini mendukung Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Untuk mencapai tugas tersebut maka setiap tahun Menyusun Perencanaan Kerja (Renja) sebagai acuan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan.

Tahun 2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan Tahun 2020 untuk keberhasilan pembangunan bidang LHK yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Permen LHK no P.16 Tahun 2020 merupakan bagian dari Upaya pemenuhan system Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Mengacu pada Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20 A, perubahan terhadap Renstra Kementerian LHK dapat dilakukan karena diantaranya terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang -Undang yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan. Indonesia yang diharapkan melalui terbitnya UU Cipta Kerja, mengharuskan kesiapan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap urusan LHK yang bersentuhan dengan Masyarakat secara langsung. Berdasarkan mandat Undang – Undang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :



Berdasarkan dengan mandat Undang – Undang Cipta Kerja, Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan mendapatkan dana penerimaan PNBP Penegakan Hukum LHK

Yang mana tujuan penggunaan dana PNBB adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2. Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan Perusahaan
3. Penegakan Hukum Pidana
4. Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kondisi Umum Balai Gakkum Kalimantan

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berpusat di Kota Samarinda yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi Wilayah, diantaranya:

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

- Seksi Wilayah I, berpusat di Kota Palangkaraya dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Seksi Wilayah II, berpusat di Kota Samarinda dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Seksi Wilayah III, berpusat di Kota Pontianak dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi dari segi manajemen, administrasi, dan organisasi dari setiap seksi relatif sama, karena masih dalam satu kontrol oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Namun, untuk kondisi lingkungan hidup dan hutan di setiap wilayah kerja seksi-seksi tersebut relatif berbeda. Untuk Seksi Wilayah I, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan akses ke lokasi kerja lebih didominasi dengan sungai. Selanjutnya, pada Seksi Wilayah II didominasi oleh kegiatan pertambangan, Hutan Tanaman Industri dan kegiatan di sekitar Wilayah Ibu Kota Negara. Untuk Seksi Wilayah III, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Pada segi kontrol kegiatan, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah mendelegasikan kepada setiap seksi-seksi wilayahnya untuk melaksanakan kegiatan di masing-masing Wilayah.

Kondisi-kondisi di atas merupakan aspek utama dalam kegiatan penegakan hukum oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, yang secara garis besar meliputi:

1. Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
3. Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
4. Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi telah dilakukan penataan birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 Tugas

Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

2 Fungsi

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
5. Penyelidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan, maka Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan membuat suatu acuan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan.

Sehingga, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada setiap awal Tahun membuat Rencana Kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Keberadaan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dirasa sangat penting, mengingat banyaknya persoalan-persoalan di bidang LHK dan ancaman terhadap pengelolaan SDA dan LH. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, karena:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip polluter pays principle di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan

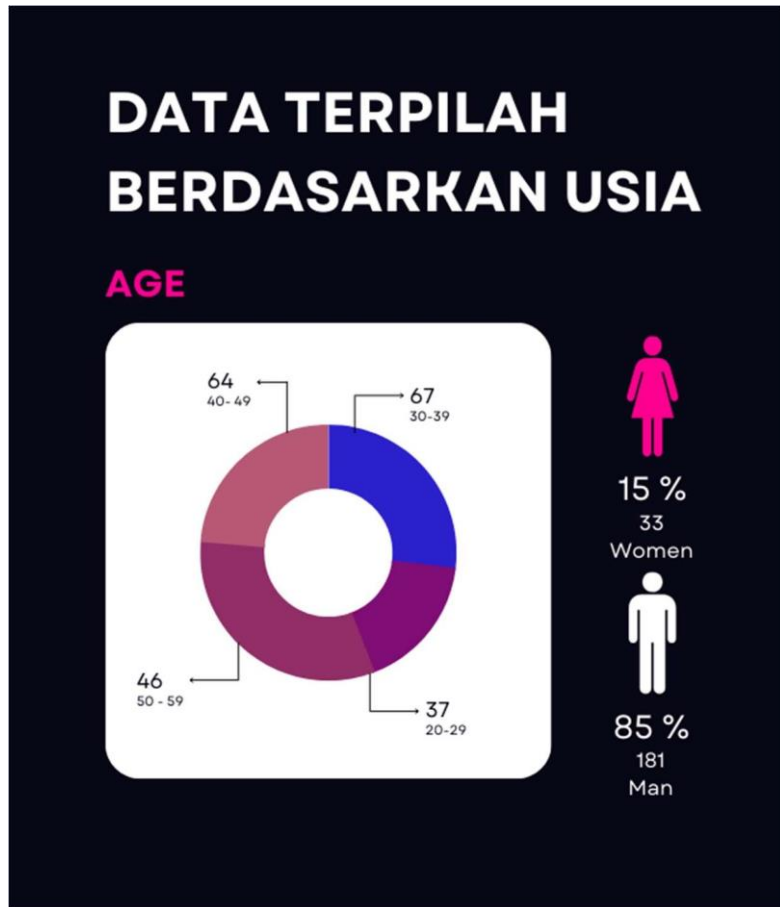
D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya manusia, adapun sumber daya manusia yang dimiliki tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Data Terpilah Sumber Daya Manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan. Data SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan per 7 November 2022 berjumlah 214 orang yang terdiri dari 186

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

ASN, 26 PPNPN dan 2 Tenaga Kontrak, dengan komposisi pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia seperti tabel dibawah ini:



E. Data Terpilah Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kerja di Lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sarana dan prasarana disediakan bagi SDM dengan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pelaksanaan tugas. Berikut adalah beberapa sarana penting yang tersedia di Balai Gakkum Wilayah Kalimantan

SARANA DAN PRASARANA

	BAIK	BURUK	TOTAL
SCANNER	15	0	15
KENDARAAN RODA 4	32	1	33
KEBDARAAN RODA 2	61	4	65
HANDY CAM	8	0	8
CAMERA UDARA	13	0	13
HANDY TALKY	33	2	35
GPS	53	6	59
COMPUTER	40	2	42
LAPTOP	95	17	112
PRINTER	65	14	79

H. Pengarusutamaan Gender TA 2024

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan semua pihak dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dan pembangunan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang mengacu pada Roadmap Ditjen Gakkum LHK Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA), Gender focal point dan Gender Champion di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan di tahun 2024 terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Road Map Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sebagai berikut :



BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 - 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKJ), yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023 ini, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan memiliki 5 (lima) sasaran kinerja yang akan dicapai dan diukur melalui beberapa indikator kinerja. Adapun sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 5 Provinsi;
- Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi;
- terselesaikannya Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup
- Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional;
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Berikut disajikan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan selama periode Tahun 2020 - 2022. Pencapaian kinerja sasaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Tahun 2020 - 2022 disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

A.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2020 - 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN		
		2020	2021	2022
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	233.805 Hektar	-	-
	Jumlah Operasi pengamanan Kawasan hutan	-	21 Operasi	15 Operasi
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, TSL	20 Operasi	20 Operasi	8 Operasi
	Peningkatan Kapasitas POLHUT	-	146 Orang	145 Orang
Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	99 Badan Usaha	119 Badan Usaha	133 Badan Usaha
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	-	21 Orang	19 Orang
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	57 Perkara	47 Perkara	26 Perkara
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang	4 Orang	10 Orang
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

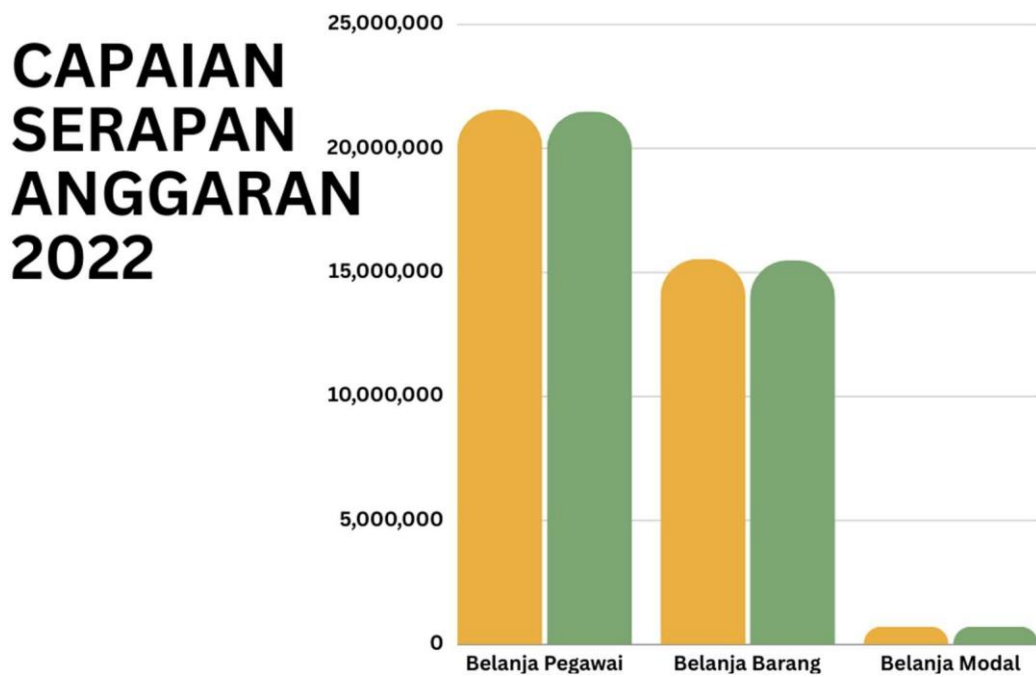
RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

A.2 Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan akhir tahun

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGNOSIS 2023	
			JUMLAH	%
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	21 Operasi	25 Operasi	119 %
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar	5 Operasi	10 Operasi	200 %
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Orang	149 Orang	1.064 %
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Meningkatkan pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	164 Badan Usaha	164 Badan Usaha	100 %
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	100 %
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	2 Perkara	2 Perkara	100 %
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	39 Perkara	39 Perkara	100 %
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	8 Orang	160 %
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	100 %

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

Tren Pagu Anggaran memiliki pengaruh signifikan seiring pandemi Covid – 19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid – 19, pemerintah perlu menentukan prioritas pembiayaan untuk sektor – sektor yang memiliki dampak langsung terhadap Masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*) sehingga anggaran pada tahun 2022 sebesar 37.830.818.000 dengan rincian serapan anggaran sebagai berikut:



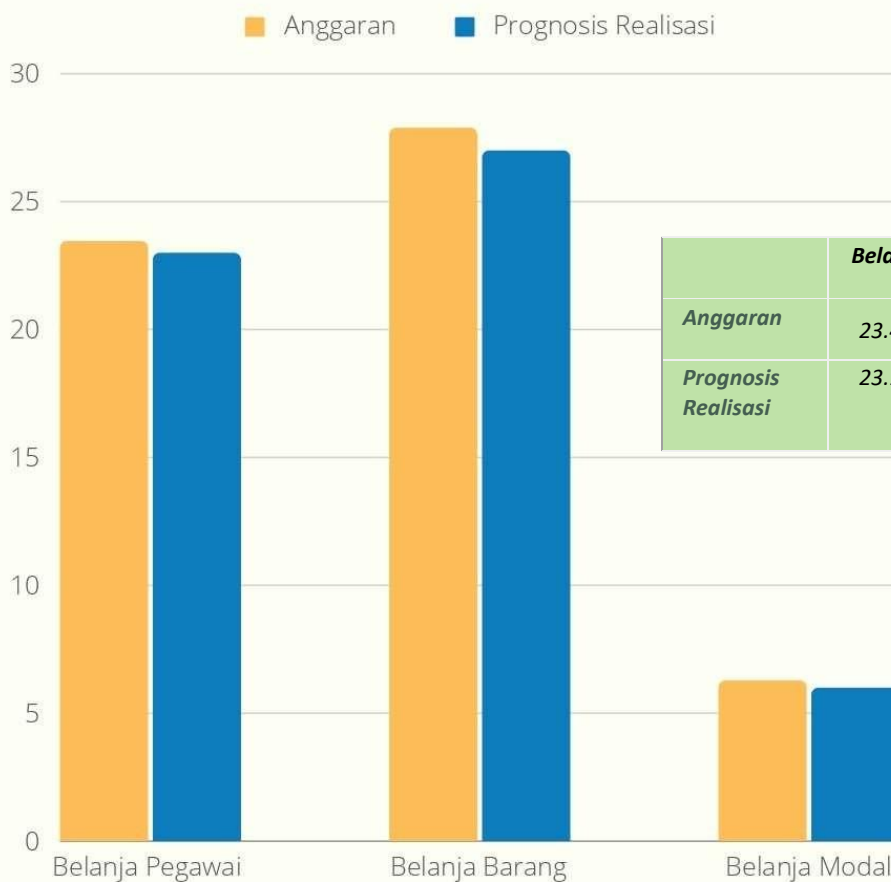
	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
Anggaran	21.559.232.000	15.546.586.000	725.000.000
Realisasi Anggaran	21.490.987.580	15.486.996.255	724.698.000

Gambar 2. Capaian Serapan Anggaran 2021

B.2 Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023

Pada awal tahun 2023 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memperoleh anggaran sebesar 47.301.821.000,- . Pada akhir tahun penyusunan anggaran tahun 2023 diberlakukannya *automatic adjustment (AA)* sebesar 1.300.000.000,- Selain karena *automatic adjustment* anggaran Balai Gakkum Wilayah Kalimantan juga mengalami penyesuaian anggaran dikarenakan adanya persetujuan penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) provisi sumber daya hutan (PSDH) dan PNBP pada direktorat jenderal penegakan hukum pidana LHK. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan capaian kinerja, pada akhir tahun Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan melakukan revisi anggaran antar kegiatan untuk dapat memaksimalkan serapan anggaran.

PROGNOSIS CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2023



	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>Belanja Barang</i>	<i>Belanja Modal</i>
<i>Anggaran</i>	23.458.833.000	27.888.821.000	6.282.000.000
<i>Prognosis Realisasi</i>	23.162.980.767	27.723.629.813	6.279.558.775

C. Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran)

Dijelaskan dalam Renja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan kedua di dalam Pelaksanaan Rencana Strategi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan serta turut menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan tentang Pencadangan Anggaran Belanja K/L TA 2023, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan mendapat mandat untuk melakukan Pencadangan Anggaran. Proses pencadangan pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 sebagai berikut :

Memorandum

Nomor :
M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022
Perihal : Automatic Adjustment (AA)
Belanja Kementerian LHK TA 2023

**Balai Gakkum Kalimantan LHK AA
sebesar 1.300.000.000**

Surat Kemenkeu

Nomor : S-654/AG/AG.3/2023
Perihal : Revisi Realokasi Blokir Automatic
Adjustment Non Belanja Pegawai TA 2023
Lingkup Ditjen PHLHK Kementerian LHK ke
Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara

**Pemotongan AA Balai Gakkum
Kalimantan LHK sebesar 1.300.000.000**

BAB III. RENCANA KERJA 2024

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional

1. RPJMN 2020 s.d 2024

RPJMN 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan penekanan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project–MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP Tahun 2023 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Empat rumusan Sasaran Strategis Kementerian LHK beserta dua puluh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 adalah:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KERJA UTAMA
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah 3. Penurunan Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 5. Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HVC – High Conservation Values)
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional 8. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan <i>Bioprospecting</i> 9. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang	10. Luas Kawasan Hutan dengan status Penetapan

	berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> 11. Luas Kawasan Hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 12. Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat
4.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan LHK yang baik serta kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> 13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan 14. Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum 15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE) 16. Hasil Litbang yang inovatif atau implementasi 17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 18. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 19. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK 20. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen

Kegiatan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan merupakan unit Pelaksana Teknis Dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah “Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan. Oleh karena itu perlu di tetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, dimana kegiatan dan targetnya akan dipengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah di tahun tahun ke depan, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis akan Sinergis dengan Kegiatan di Pusat.

Dalam rangka untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut disusun rencana kerja yang terdiri dari beberapa indikator kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan dari

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan Tahun 2024, sebagai berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Satuan
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	20	Operasi
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar	12	Operasi
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesaiakannya Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan	2	Perkara
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	130	Badan Usaha
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	40	Perkara
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	93.89	Poin

C. Pendanaan Kegiatan Tahun 2024

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024, diperlukan anggaran dengan komposisi pada tabel berikut. Dengan sumber pendanaan untuk kegiatan di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berasal dari rupiah murni (RM) sebesar 38.164.418.000 (57,46%) dan dari PNBPN sebesar 28.247.816.000 (42,53%).

Klarifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Anggaran
Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan		20	Operasi	6,675,140,000
		Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan			1,893,140,000
		Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan			4,782,000,000
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal			4,157,457,000
		Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Sosialisasi dan Kerjasama PPH			1,177,152,000
		Operasi Pembalakan Liar			150,000,000
		Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar			1,199,205,000
		Dukungan Teknis PPH			1,031,100,000
					600,000,000
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya		15	Orang	200,000,000
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK			
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan Usaha yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-		130	Badan Usaha	4,205,620,000

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

undangan bidang LHK				
				1,259,600,000
				770,000,000
				2,176,020,000
Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P-21	40	Perkara	9,562,840,000
				3,704,000,000
				4,426,400,000
				832,440,000
				400,000,000
				200,000,000
Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	2	Perkara	580,000,000
				240,000,000
				60,000,000
				280,000,000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1	Layanan	29,591,821,000
				2,300,000,000
	Layanan Perkantoran	1	Layanan	26,366,000,000
				3,225,821,000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1	Unit	9,139,356,000
				1,323,000,000

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	450,000,000
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	766,356,000
Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan	6,600,000,000

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan merupakan panduan pengelola dalam menjalankan pengelolaan dalam setahun ke depan. Rencana pengelolaan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga secara adaptif dapat diimplementasikan di lapangan.

Semangat pengelolaan kolaboratif dari pihak (*stakeholders*) merupakan modal utama dalam mengukung sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah “Pencegahan dan Pengamanan Hutan” dan “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Perlu disadari bahwa RENJA ini bukanlah merupakan dokumen yang sempurna dan tanpa Kelemahan. Oleh Sebab itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA tahun berikutnya.

Dengan RENJA ini diharapkan tercapai optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sehingga tercapai sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)
	029.10.FD Kualitas Lingkungan Hidup								13.131.000.000
1.	5429 – Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesainya Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	QCE - Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	001 – Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	Palangka Raya – Kalteng Banjarmasin – Kalsel, Samarinda – Kaltim, Bulungan – Kaltara, Pontianak - Kalbar	051 - Verifikasi dan Klasifikasi Perkara Sengketa LH 052 – Penghitungan Kerugian LH / Masyarakat 053 – Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	2 Perkara	240.000.000 60.000.000 280.000.000
2.	5430 - Penanganan Pengaduan, Pengawasan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Pengawasan Ketaatan LHK pada Badan Usaha Peningkatan kapasitas PPNS	QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001 – Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya,	051 - Penanganan Pengaduan Perusahaan 052 – Penanganan Pengaduan Non Perusahaan 053 – Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	130 Badan Usaha	1.259.600.000 770.000.000 2.176.020.000

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

						Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat Palangka Raya - Kalteng, Samarinda - Kaltim, Pontianak - Kalbar			
3.	5431 - Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK P21	QCE – Kasus Tindak Pidana LHK P21	001 - Kasus Tindak Pidana LHK P21	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab. Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	051 – Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas dugaan Tindak Pidana LHK 052 – Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK 053 – Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK 054 – Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 055 – Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	40 Perkara	3.704.000.000 4.426.400.000 832.440.000 400.000.000 200.000.000
	029.10.FF Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
4.	5428 – Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya peningkatan kapasitas polisi kehutanan	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	DCE – Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 – Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Palangkaraya – Kalimantan Tengah, Samarinda – Kalimantan Timur, Pontianak – Kalimantan Barat	051 – Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	200.000.000

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	QHD - Operasi Bidang Keamanan	001 - Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab. Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	051 – Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	20 Operasi	1.893.140.000	
					052 – Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan		4.782.000.000	
	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	QHD - Operasi Bidang Keamanan	002 - Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan	051 - Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi	1.177.152.000
						053 - Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan		150.000.000
054 - Operasi Pembalakan Liar				1.199.205.000				

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

						Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	055 - Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar		1.031.100.000
							057 – Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan		600.000.000
	029.10.WA Dukungan Manajemen								
5	5427 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Palangakaraya – Kalimantan Tengah, Banjar baru – Kalimantan Selatan, Samarinda – Kalimantan Timur, Bulungan – Kalimantan Utara, Pontianak – Kalimantan Barat	001 - Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	26.366.000.000
					962 - Layanan Umum	Palangakaraya – Kalimantan Tengah, Banjar baru – Kalimantan Selatan, Samarinda – Kalimantan Timur, Bulungan – Kalimantan Utara, Pontianak – Kalimantan Barat	002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3.225.821.000
							054 – Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	2.300.000.000
				EBB – Layanan Sarana Internal	951 – Layanan Sarana Internal	Palangakaraya – Kalimantan Tengah, Banjar baru – Kalimantan Selatan, Samarinda – Kalimantan Timur, Bulungan – Kalimantan Utara, Pontianak – Kalimantan Barat	051 – Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Unit	1.323.000.000

RENCANA KERJA GAKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2024

							052 – Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	450.000.000
							053 – Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	766.356.000
							054 – Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan	6.600.000.000



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
Komplek Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda,
Jl. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com